



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 40 TAHUN 2022**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN  
TAHUN 2023**

Pakan Rabaa, 4 Agustus 2022



SALINAN

BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 36).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

## **Pasal 2**

Maksud penyusunan Renja PD adalah untuk :

- a. Menjabarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun 2023 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD; dan
- b. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan masing-masing PD untuk tahun 2023.

## **Pasal 3**

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk :

- a. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2023;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD tahun 2023.

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA PENULISAN**

#### **Pasal 4**

(1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

- ( 2 ) Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN**

##### **Pasal 5**

- ( 1 ) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2023 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2023 dan Renstra PD.
- ( 2 ) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari RKPD.
- ( 3 ) PD menyusun RKA Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Renja PD.

##### **Pasal 6**

Agar program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja PD dapat dilaksanakan serta untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka PD harus memastikan substansi Renja PD dapat dituangkan ke dalam DPA PD Tahun 2023.

### **BAB IV**

#### **PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 7**

Pembiayaan pelaksanaan Renja PD ini bersumber dari APBD Kabupaten.

### **BAB V**

#### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

##### **Pasal 8**

- ( 1 ) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.
- ( 2 ) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 4 Agustus 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak  
pada tanggal 4 Agustus 2022


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022 NOMOR 40

salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA

  
**ERI FORTUNA, SH**  
NIP.19660104199303 1 006



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas Rahmat-Nya, Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

Adapun penyusunan Rencana Kerja OPD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan diatur secara rinci dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dan Rencana Strategis Kecamatan Lareh Sago Halaban Tahun 2021- 2026.

Harapan kami semoga Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Kecamatan Lareh Sago Halaban Tahun 2023.

Kami menyadari dokumen Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban ini masih jauh dari kesempurnaan, baik di dalam proses perumusan ataupun penyusunannya. Oleh karena itu, kami mengharapkan sumbang saran dan koreksi dari semua pihak yang terkait, guna penyempurnaan Rencana Kerja ini.

Pakan Rabaa, Agustus 2022



## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
	1.1 Latar Belakang .....	1
	1.2 Landasan Hukum .....	8
	1.3 Maksud dan Tujuan .....	11
	1.4 Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II</b>	<b>: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN TAHUN LALU .....</b>	<b>14</b>
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Lareh Sago Halaban.....	15
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Lareh Sago Halaban.....	25
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Lareh Sago Halaban.....	27
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	32
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.	48
<b>BAB III</b>	<b>: TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN .....</b>	<b>49</b>
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	49
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD.....	49
	3.3 Program dan Kegiatan	51
<b>BAB IV</b>	<b>: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>56</b>
	4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 (Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2019) .....	66
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP.....</b>	<b>69</b>

## Daftar Tabel

		Halaman
Tabel		
1.1	Kalender Penyusunan Rencana Kerja .....	3
Tabel	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan	
TC.3	Renja Kecamatan Lareh Sago Halaban Tahun dan Pencapaian Renstra Kec. Lareh Sago Halaban s/d Tahun 2021 Kabupaten Lima Puluh Kota .....	15
Tabel	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	
2.2	Lareh Sago Halaban .....	25
Tabel	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	
TC 3.1	tahun 2023 .....	22
Tabel	Pencapaian Indikator Kinerja	
2.4	.....	26
Tabel	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	
2.5	tahun 2023 .....	32
Tabel	Usulan Program dan Kegiatan dari Para	
Tc 3.2	Pemangku Kepentingan .....	48
Tabel	Program dan kegiatan Kecamatan Lareh	
3.3	Sago Halaban (Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019) .....	51
Tabel	Identifikasi Permasalahan Untuk	
3.6	Penentuan Program Prioritas Kecamatan Lareh Sago Halaban .....	55
Tabel	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan	
3.4	Tahun 2023 .....	56
Tabel	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat	
4.1	Daerah .....	63
Tabel	Rencana Target Kinerja Pelayanan	
4.2	Perangkat Daerah Tahun 2022 & 2023 .....	67

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2017, Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Rancangan Peraturan Daerah. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimana Rencana Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah Paling Lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan.

Untuk tingkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) juga dilakukan penyusunan perencanaan, yaitu Rencana Strategis OPD (Renstra-OPD) dengan ruang lingkup waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja OPD (Renja-OPD) dengan ruang lingkup waktu 1 (satu) tahun.

Untuk menyikapi amanah Permendagri No. 86 tahun 2017 dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 tentang Pedoman penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan penyusunan dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 10 Tahun 2011 Tentang RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026.

Penyusunan Renja PD ini dilaksanakan dalam rangka menjabarkan RPJPD. Penyusunan Renja PD ini didasari oleh visi dan misi serta program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya penyusunan RPJMD ini merupakan penyusunan RPJMD tahap ketiga dalam ruang lingkup RPJPD 2021-2026.

Selanjutnya sebagai salah satu OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Kecamatan Lareh Sago Halaban juga perlu menyusun perencanaan tahunan, yaitu berupa Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban. Renja Kecamatan Lareh Sago Halaban ini merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Lareh Sago Halaban dan sekaligus penjabaran Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 33 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021. Oleh Karena itu, sesuai dengan amanah Permendagri No. 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Rencana Perangkat Daerah ditetapkan

dengan Peraturan Kepala Daerah Paling Lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan.

Dalam melakukan penyusunan Renja PD Tahun 2023, Kecamatan Lareh Sago Halaban melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan. Dengan berpedoman pada pasal 16 ayat 2 Permendagri 86 Tahun 2017, tahapan penyusunan Renja Kecamatan Lareh Sago Halaban sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan
  2. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban
  3. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban
  4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
  5. Perumusan Rencana Kerja Lareh Sago Halaban dan
  6. Penetapan
1. Persiapan penyusunan Meliputi :
    - a. Mengusulkan Nama-nama personil yang akan mengisi Struktur Organisasi Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lareh Sago Halaban tahun 2023 ke Bapelitbang untuk dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja).
    - b. Mengadakan orientasi penyusunan Renja Kecamatan Lareh Sago Halaban yang melibatkan seluruh anggota tim penyusunan Renja untuk menyamakan persepsi antar sesama anggota tim dalam hal tatacara, kaidah serta jadwal penyusunan penyusunan renja.
    - c. Kalender / Agenda Penyusunan Renja  
Demi kelancaran dan pemenuhan ketepatan waktu penyusunan, maka disusun Kalender Penyusunan Renja Kecamatan Lareh Sago Halaban dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bupati Lima Puluh Kota Nomor 027/1/II/SE/BAPELITBANG-LK/2021 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023 serta menyesuaikan dengan perkembangan penyusunan RKPD Tahun 2023 serta menyesuaikan dengan perkembangan penyusunan RKPD Tahun 2023.  
Berikut agenda penyusunan renja:











2. **Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban**

Pada awal bulan Maret 2022 dilakukan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban oleh tim penyusun hasil evaluasi hasil Renja tahun 2023, dan hasil evaluasi hasil Renja tahun 2022. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja tahun lalu yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

  - a. Pendahuluan;
  - b. Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu;
  - c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
  - d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
  - e. Penutup.
3. **Penyusunan Rancangan**

Penyusunan Rencana Kerja merupakan Rancangan Awal Renja yang disempurnakan mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif.
4. **Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah**

Berdasarkan hasil koordinasi Kecamatan Lareh Sago Halaban dan OPD terkait seperti Bapelitbang, maka demi efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Koordinasi dilaksanakan pada Bulan Maret 2022.
5. **Perumusan Rencana Kerja**

Perumusan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rencana kerja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Rencana Kerja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika yang sama dengan Rancangan Awal Renja Kecamatan Lareh Sago Halaban.
6. **Penetapan**

Dalam hal penetapan Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban melakukan pemeriksaan akhir dan Koordinasi dengan Bapelitbang tentang Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban tahun 2023.

## 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
  14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
  21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
  22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);
  23. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 20);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

- Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1)
  28. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
  29. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 (Berita Acara Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 43);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Dengan telah dilaksanakannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Kecamatan tidak lagi sebagai wilayah administrasi sebagaimana kita kenal selama ini, akan tetapi kecamatan mempunyai kedudukan sebagai Perangkat Daerah.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban ini adalah untuk:

1. Menjabarkan visi, misi dan program Kecamatan Lareh Sago Halaban secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lareh Sago Halaban Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2023 sesuai dengan urusan dan kewenangan Kecamatan Lareh Sago Halaban.

2. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan serta sub Kegiatan Kecamatan Lareh Sago Halaban untuk tahun 2023.
3. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Lareh Sago Halaban guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban ini ditujukan untuk :

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Kecamatan Lareh Sago Halaban dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2023.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan seksi-seksi di Kecamatan Lareh Sago Halaban Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Lareh Sago Halaban pada tahun 2023.
3. Untuk meningkatkan Kompetensi profesionalisme dan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Lareh Sago Halaban, agar bertanggung jawab, mampu, jujur, terarah dan terprogram, mengacu pada norma, standar, dan prosedur yang berlaku dengan didukung oleh sistem administrasi yang efektif dan efisien.
4. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
5. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya Kecamatan Lareh Sago Halaban;
6. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban Tahun 2023 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Lareh Sago Halaban, maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup, landasan penyusunan dan sistematika penulisan.
- Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Lareh Sago Halaban Tahun Lalu, Bab II yang berisi:
1. Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Lareh Sago Halaban
  2. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Lareh Sago Halaban
  3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Lareh Sago Halaban
  4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
  5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
- Bab III Tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2023, telaahan terhadap kebijakan nasional, dan tujuan dan sasaran renja Perangkat Daerah
- Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- Bab V Penutup menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Lareh Sago Halaban Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Lareh Sago Halaban**

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Lareh Sago Halaban tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Lareh Sago Halaban berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Lareh Sago Halaban tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Lareh Sago Halaban tahun lalu, dan realisasi Renstra Kecamatan Lareh Sago Halaban mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Lareh Sago Halaban dan/atau realisasi APBD untuk Kecamatan Lareh Sago Halaban.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain: Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Lareh Sago Halaban; dan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Lareh Sago Halaban tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Lareh Sago Halaban, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Lareh Sago Halaban dan Pencapaian Renstra Kecamatan Lareh Sago Halaban sampai dengan Tahun 2023 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel berikut:

**Tabel TC.29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Lareh Sago Halaban Tahun 2021 s/d Tahun 2022**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020  (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD tahun berjalan (tahun 2022/(n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)		
					Target Renja OPD Tahun 2021/(n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2021/(n-2)	Tingkat Realisasi (%) tahun 2021		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5)	11=(10/4)	
	Urusan Pemerintahan Umum										
5	XX	Kewilayahan									
1	11	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	75	60.80			60.80	81,1%	
1	11	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan	12 bulan			12 bulan	100 %
1	11	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	12 bulan	12 bulan			12 bulan	100 %

1	11	1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan					12 bulan	100 %
1	11	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	7 unit	7 unit					7 unit	100%
1	11	1	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan					12 bulan	100 %
1	11	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan peralatan kebersihan	12 bulan	12 bulan					12 bulan	100 %
1	11	1	9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan komputer, laptop, printer dan peralatan kantor lainnya	12 bulan	12 bulan					12 bulan	100 %
1	11	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan					12 bulan	100 %
1	11	1	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan					12 bulan	100 %
1	11	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan					12 bulan	100 %
1	11	1	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan					12 bulan	100 %

1	11	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	12 bulan	12 bulan					12 bulan	100 %
1	11	1	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	12 bulan					12 bulan	100 %
1	11	2		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>90</b>	<b>88,38</b>					<b>88,38</b>	<b>90,82%</b>
1	11	2	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	4 unit	1 unit					1 unit	25%

1	11	2	10	Pengadaan Meubeleur	Tersedianya meubeleur kantor	80	33 unit				33 unit	37,5%
1	11	2	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12 bulan	12 bulan				12 bulan	100 %
1	11	2	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor	12 bulan	12 bulan				12 bulan	100 %
1	11	6		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban</b>	<b>75</b>	<b>60.80</b>				<b>60.80</b>	<b>81,1%</b>
1	11	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	12 bulan	12 bulan				12 bulan	100%
1	11	15		<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>	<b>Meningkatnya Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif</b>	<b>100%</b>	<b>80 %</b>				<b>50 %</b>	<b>50%</b>

1	11	15	1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terlaksananya Pilwanag dan Keikutsertaan pada MTQ Tk. Kabupaten serta kegiatan kemasyarakatan lainnya	12 bulan	12 bulan				12 bulan	100%
1	11	17		<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>	<b>Meningkatnya Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Lareh Sago Halaban</b>	<b>8 Nagari</b>	<b>8 Nagari</b>				<b>8 Nagari</b>	<b>100%</b>
1	11	17	2	Pelaksanaan Musyawarah pembangunan Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang Kecamatan	8 nagari	8 nagari				8 nagari	100 %
4	XX	1		<b>Sekretariat</b>								
1	11	23		<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	<b>Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>80</b>	<b>88,38</b>				<b>88,38</b>	<b>110,47%</b>
1	11	23	6	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan PATEN	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	12 bulan	12 bulan				12 bulan	100 %
1	11	24		<b>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Lareh Sago Halaban</b>	<b>8 nagari</b>	<b>8 nagari</b>				<b>100%</b>	<b>100%</b>

1	11	24	3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya lomba nagari	8 nagari	8 nagari					8 nagari	100 %
5	XX	1		<b>Kecamatan</b>									
1	11	xx		<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu</b>	<b>60%</b>	<b>50%</b>					<b>50%</b>	<b>83,33%</b>
1	11	xx	xx	Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APB-Nagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Publik	Ditetapkannya APB Nagari tepat waktu	8 nagari	8 nagari					8 nagari	100 %
1	11	8	19	Bimbingan, Supervisi, & Pengawasan dana nagari	Terlaksananya penyaluran dana Nagari sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	8 nagari	8 nagari					8 nagari	100 %
1	11	24	4	Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Terciptanya keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	8 nagari	8 nagari					8 nagari	100 %
1	11	xx	xx	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial Lainnya	Terpantaunya Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial Lainnya dengan Baik	8 nagari	8 nagari					8 nagari	100 %

Tabel T.C-29

**Pencapaian Renstra Kec. Lareh Sago Halaban s/d Tahun 2022  
Kabupaten Lima Puluh Kota**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD tahun berjalan (tahun 2022/(n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	
				(n-3)	Target Renja OPD Tahun 2021/(n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2021/(n-2)	Tingkat Realisasi (%) tahun		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi target renstra
							2021			(%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
7										
7	01									
7	01	01								
7	01	01	2.01							
7	01	01	2.02							
7	01	01	2.03							
7	01	01	2.05							



7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	70		75	62,06	82,74 %	75	137,06	100%
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	70		75	62,06	82,74 %	75	137,06	100%
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	70		75	62,06	82,74 %	75	137,06	100%
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	70		75	62,06	82,74 %	75	137,06	100%
7	01	02		<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>90</b>		<b>80</b>	<b>89,72</b>	<b>112,15%</b>	<b>94</b>	<b>183,72</b>	<b>100%</b>
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90		80	89,72	112,15%	94	183,72	100%
7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90		80	89,72	112,15%	94	183,72	100%
7	01	03		<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan</b>	<b>75%</b>		<b>100%</b>	<b>87,5%</b>	<b>87,5%</b>	<b>100%</b>	<b>187,5%</b>	<b>100%</b>
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Lareh Sago Halaban	75%		100%	87,5%	87,5%	100%	187,5%	100%
7	01	04		<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>90</b>		<b>80</b>	<b>89,72</b>	<b>112,15</b>	<b>94</b>	<b>183,72</b>	<b>100%</b>

7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90		80	89,72	112,15%	94	183,72	100%
7	01	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90		80	89,72	112,15%	94	183,72	100%
7	01	05		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90		80	89,72	112,15%	94	183,72	100%
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90		80	89,72	112,15%	94	183,72	100%
7	01	06		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	60%		75%	25%	30%	85%	100%	100%
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	60%		75%	25%	30%	85%	100%	100%

Pakan Rabaa, Agustus 2022

**CAMAT LAREH SAGO HALABAN**



**RUMELLIA, S.STP, M.Si**  
**NIP.19770503 199511 2 001**

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Lareh Sago Halaban**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika OPD yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap OPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan. Selanjutnya hasil analisisnya disajikan pada bagian ini.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan OPD, yang disesuaikan menurut OPD masing-masing, dengan format sebagai berikut:

**Tabel T-C 2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lareh Sago Halaban**

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKD (PP-6/08)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4									
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	Hasil Review Inspektorat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	65	64	67	68	60.80	62.06	67	68	
2	Meningkatnya Aktifitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	<u>Jumlah Lembaga Yang Aktif/Jumlah Total Lembaga</u>	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	93	94	95	96	80%	80%	95	96	
3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	Sesuai dengan SK Menpan No. 16 Tahun 2014 dan Keputusan Menpan No. KEP/25.M.PAN/2/2004 tentang survey Kepuasan Masyarakat.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	94	95	96	88.38	89.72	95	96	

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lima Puluh Kota**

NO	Sasaran	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai AKIP	65	64	67	68	60.80	62.06	67	68	
2	Meningkatnya Aktifitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	93	94	95	96	80%	80%	95	96	
3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	94	95	96	88.38	89.72	95	96	

Pada tahun 2021 terjadi perubahan capaian sasaran Kinerja pada Renstra 2021 – 2026 Kecamatan Lareh Sago Halaban, sedangkan perhitungan LKJiP Tahun 2021 masih menggunakan Target Renstra Tahun 2016-2021. Pada tabel TC-22 di atas di gunakan capaian kinerja tahun yang terbaru yaitu Renstra 2021 – 2026.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Lareh Sago Halaban**

Pada Bab ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Lareh Sago Halaban terhadap Masyarakat
  2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Lareh Sago Halaban.
  3. Dampak dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional dan SDGs (*Sustainable Development Goals*).
  4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan Pelayanan Kecamatan Lareh Sago Halaban .
  5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2022.
- 
1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Lareh Sago Halaban terhadap Masyarakat
- Menurut Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Kecamatan yang memuat Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Kecamatan, bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah tertentu, dipimpin oleh camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

*Fungsi Camat :*

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- b. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada ;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan ;
- f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah nagari;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan ;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

Berdasarkan analisis gambaran Tupoksi Camat, kajian hasil evaluasi pelaksanaan OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD.

2. Permasalahan dan hambatan menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah OPD Kecamatan Lareh Sago Halaban antara lain :
  - a. Lokasi geografis, Luas Wilayah dan dan jumlah Penduduk menjadi hambatan pemberian Pelayanan Paten di Kecamatan Lareh Sago Halaban.
  - a. Penilaian SAKIP untuk Kabupaten Lima Puluh Kota hanya mencakup beberapa OPD yang menjadi sampel dari OPD yang ada dan Kecamatan Lareh Sago Halaban tidak termasuk OPD yang dinilai.
  - b. Nilai IKM terhadap pelayanan Publik Kecamatan Lareh Sago Halaban
  - c. Rendahnya Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari Tepat Waktu
  - d. Belum Optimalnya Perkembangan Bumrag Nagari.
3. Permasalahan dan Hambatan diatas tentu saja berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026. Kecamatan Lareh Sago Halaban sebagai OPD dilingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian dari pendukung terhadap pencapaian misi ke 4 (empat) yaitu meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik dengan tujuannya adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas serta sasarannya adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Lareh Sago Halaban Kinerja pelayanan Kecamatan Lareh Sago Halaban.
  - a. Lokasi geografis yang berbukit, Luas Wilayah dan dan jumlah sebaran Penduduk menjadi tantangan tersendiri dalam pemberian Pelayanan Paten di Kecamatan Lareh Sago Halaban.
  - b. Peluang untuk meningkatkan realisasi jumlah masyarakat yang akan terlayani dalam pengurusan administrasi Kecamatan.
  - c. Perbaikan kinerja SDM Kecamatan yang didukung dengan anggaran dan sarana /prasarana yang tersedia.



5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2021:
  1. Melakukan pelayanan di Kantor Camat dengan mengumpulkan seluruh bahan administrasi kependudukan dan akan secara berkala mengajukan pengurusanya ke kantor Catatan Sipil dan akan di konfirmasi kepada masyarakat yang melakukan pengurusan setelah selesai dokumen kependudukan selesai.
  2. Tetap melakukan penyusunan SAKIP dengan benar, sesuai dengan peraturan yang ada dan tepat waktu.
  3. Nilai pengukuran IKM telah baik dan akan dilakukan inovasi baru untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat.
  4. Lebih Mengintensifkan monitoring dan pembinaan ke Nagari untuk peningkatan Status Nagari yang Masih Berkembang menjadi Maju dan realisasi penetapan APB Nagari tepat waktu.
  5. Lebih mendorong perkembangan BUMNAG yang belum berkembang dan melakukan pembinaan Bumnag yang aktif agar lebih maju

## **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Bab ini berisikan uraian mengenai perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dijelaskan juga mengenai alasan proses tersebut dilakukan serta penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

### **2.4.1 Proses yang di lakukan membandingkan**

Adapun hasil perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang tertuang dalam renja Bapelitbang terlihat bahwa ada penambahan Program maupun penambahan kegiatan

#### 2.4.2 Alasan dilakukannya proses

Adapun dilakukan penambahan Program dan kegiatan bertujuan untuk mengetahui manfaat atau kerugian dalam penambahan program dan kegiatan tersebut.

#### 2.4.3 Temuan setelah proses.

Adapun hasil temuan yang tertuang dalam Renja Kecamatan Lareh Sago Halaban Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Jumlah program yang tertuang pada rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan yang tertuang pada renja Kecamatan Lareh Sago Halaban adalah 6 program,
2. Jumlah kegiatan yang tertuang pada rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan yang tertuang pada renja Kecamatan Lareh Sago Halaban adalah 14 Kegiatan.
3. Jumlah pagu pada rancangan awal RKPD **Rp 3.003.229.612** sedangkan pagu pada Hasil Analisis Kebutuhan **Rp 1.887.651.900**

**Tabel T-C.3 1**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota**

Nama OPD : Kec. Lareh Sago Halaban

No	Rancangan Awal RKPD ( sesuaikan dengan renstra )					Hasil Analisis Kebutuhan (ambil dari SIPD)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I											
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Kec. Lareh Sago Halaban	<b>Nilai AKIP</b>	<b>67</b>	<b>Rp 3.003.229.612</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Kec. Lareh Sago Halaban	<b>Nilai AKIP</b>	<b>67</b>	<b>Rp 1.719.216.590</b>	
2	<b>Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>	Kec. Lareh Sago Halaban			<b>Rp 29.248.700</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>	Kec. Lareh Sago Halaban	Nilai AKIP	67	Rp 33.497.100	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Lareh Sago Halaban	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 4.685.300	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Lareh Sago Halaban	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 4,410,000	

4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Lareh Sago Halaban	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	5 Dokumen	Rp 4.717.200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Lareh Sago Halaban	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2 Dokumen	Rp 4.400.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Lareh Sago Halaban	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	5 Dokumen	Rp 3.712.600	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Lareh Sago Halaban	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	2 Dokumen	Rp 2.095.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Lareh Sago Halaban	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	Rp. 4.953.300	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Lareh Sago Halaban	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	Rp 5.465.000	

7	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Lareh Sago Halaban	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	Rp 3.585.200	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Lareh Sago Halaban	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	Rp 3.735.000	
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Lareh Sago Halaban	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	Rp 7.595.100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Lareh Sago Halaban	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Rp 13.392.100	
9	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kec. Lareh Sago Halaban			Rp 1.818.224.112	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kec. Lareh Sago Halaban	Nilai AKIP		1,315,806,690	
10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Lareh Sago Halaban	Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS	12 bulan	Rp 1.804.986.012	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Lareh Sago Halaban	Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS	12 bulan	Rp 1.307.621.890	

11	Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen verifikasi dan penatausahaan keuangan	12 bulan	Rp 4.618.800	Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Lareh Sago Halaban	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen SPJ	12 dokumen	Rp 750.500	
12	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		Dokumen Laporan akhir tahun	12 bulan	Rp. 5.686.200	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kec. Lareh Sago Halaban	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Dokumen	Rp 4.309.300	
13	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD		Dokumen realisasi triwulan dan semester SKPD	15 dokumen	Rp 1.498.200	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Kec. Lareh Sago Halaban	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 dokumen	Rp 1.325.000	
14	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran		Dokumen laporan analisis prognosis	1 dokumen	Rp 1.434.900	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Kec. Lareh Sago Halaban	Laporan Prognosis	1 Dokumen	Rp 1.800.000	

15	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>Rp 2.137.600</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Lareh Sago Halaban</b>			<b>Rp 2,280,000</b>	
16	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Lareh Sago Halaban			Rp 2.137.600	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		DUK, Karis, Karsu, Taspen, NPWP, Rekomendasi TPP dan SKP	15 orang	Rp 2,280,000	
17	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kec. Lareh Sago Halaban			<b>Rp 117.915.500</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kec. Lareh Sago Halaban	Nilai AKIP		Rp 166,786,900	
18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Lareh Sago Halaban	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		Rp 3.215.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Lareh Sago Halaban	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 jenis	Rp 2.482.000	
19	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Lareh Sago Halaban	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor		Rp 19.500.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Lareh Sago Halaban	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor	7 Unit	Rp 45.100.000	

20	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Lareh Sago Halaban	Jumlah bahan paket logistik kantor yang disediakan		Rp 13.264.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Lareh Sago Halaban	Tersedianya alat Tulis Kantor	20 jenis	Rp 14.037.000	
21	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Lareh Sago Halaban	Jumlah Paket Barang cetak dan pengadaan yang disediakan		Rp 10.731.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Lareh Sago Halaban	Jumlah Paket Barang cetak dan pengadaan yang disediakan	12 bulan	Rp 11.885.900	
22	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Rp 2.100.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Lareh Sago Halaban	Tersedianya anggaran kunjungan Tamu	12 bulan	Rp 2.875.000	
23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Lareh Sago Halaban	Pelaksanaan Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sesuai kebutuhan	12 bulan	Rp 69.105.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Lareh Sago Halaban	Pelaksanaan Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sesuai kebutuhan	12 bulan	Rp 90.407.000	



24	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kec. Lareh Sago Halaban			Rp 351.524.000	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kec. Lareh Sago Halaban	Nilai AKIP		Rp 35,460,000	
25	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kec. Lareh Sago Halaban		1 unit	Rp 332.219.000						
26	Pengadaan mebel	Kec. Lareh Sago Halaban	Tersedianya mebel kantor	2 unit	Rp 19.305.000	Pengadaan Mebel	Kec. Lareh Sago Halaban	Meja dan kursi Pimpinan		35.460.000	
27	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kec. Lareh Sago Halaban			Rp 104.013.500	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kec. Lareh Sago Halaban			Rp 95,855,900	
28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Lareh Sago Halaban	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat		Rp 4.800.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Lareh Sago Halaban	Tersedianya pembelian materai 10,000,-	170 buah	Rp 3.170.000	

29	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air		Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 bulan	Rp 11.320.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air		Pembayaran tagihan rekening listrik	12 bulan	Rp 4.000.000	
30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Lareh Sago Halaban	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 bulan	Rp 87.893.500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Lareh Sago Halaban	Peralatan Kebersihan dan Honor petugas kebersihan dan honorarium pengelolaan brg	12 bulan	Rp 23.880.700	
31	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Lareh Sago Halaban</b>			<b>Rp 75.700.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kec. Lareh Sago Halaban	Nilai AKIP		Rp 69,530,000	

32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Lareh Sago Halaban	Pelaksanaan pembayaran Pajak dan Pemeliharaan Rutin/berkala Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas jabatan		Rp 64.900.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Lareh Sago Halaban	BBM, Suku Cadang, Service dan Pajak kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	9 unit	Rp 65,340,000	
33	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Lareh Sago Halaban	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		Rp 5.840.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Lareh Sago Halaban	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 unit	Rp 4,190,000	
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Lareh Sago Halaban	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya	1 unit	Rp 4.960.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Lareh Sago Halaban	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya	1 unit		
35	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Kec. Lareh Sago Halaban</b>		<b>100 %</b>	<b>Rp 67.672.800</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Kec. Lareh Sago Halaban</b>			<b>Rp 59,500,000</b>	

36	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Kec. Lareh Sago Halaban</b>			<b>Rp 4.885.000</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Kec. Lareh Sago Halaban			Rp 3,940,000	
37	Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait	Kec. Lareh Sago Halaban			Rp. 4.885.000	Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait	Kec. Lareh Sago Halaban	terlaksananya koordinasi dengan pemerintahan nagari	1 kegiatan	Rp 1,740,000	
38	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Lareh Sago Halaban	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	12 bulan	Rp 62.787.800	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Lareh Sago Halaban	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	12 bulan	Rp 2.200.000	
39	<b>Penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	Kec. Lareh Sago Halaban	Meningkatnya kepuasan masyarakat		Rp 62.787.800	<b>Penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	Kec. Lareh Sago Halaban			Rp 55.560.000	

40	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Lareh Sago Halaban	Jumlah Laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	12 laporan	Rp 62.787.800	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Lareh Sago Halaban	Jumlah Laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	12 laporan	Rp 55.560.000	
41	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN</b>	Kec. Lareh Sago Halaban			Rp 51.935.000	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN</b>	Kec. Lareh Sago Halaban			<b>Rp 81.000.000</b>	
42	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Kec. Lareh Sago Halaban			Rp 51.935.000	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Kec. Lareh Sago Halaban			<b>Rp 36.000.000</b>	
43	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Lareh Sago Halaban	Musrenbang tk. kecamatan		Rp 19.135.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Lareh Sago Halaban			Rp 12.120.000	
44	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Lareh Sago Halaban	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan		Rp 32.800.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Lareh Sago Halaban			Rp 10.875.000	
45						<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Kec. Lareh Sago Halaban</b>			Rp 25.000.000	

						<b>Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>					
46						Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kec. Lareh Sago Halaban	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	100 keluarga	Rp 12.100.000	
47						Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kec. Lareh Sago Halaban	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dengan menerapkan prilaku hidup bersih dan sehat	100 keluarga	Rp 12.880.000	
48	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Kec. Lareh Sago Halaban</b>	<b>Terlaksananya monitoring dan evaluasi</b>	<b>1 kegiatan</b>	<b>Rp 9.955.000</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Kec. Lareh Sago Halaban</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>		<b>Rp 3.025.000</b>	
49	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Kec. Lareh Sago Halaban</b>			<b>Rp 6.115.000</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Kec. Lareh Sago Halaban</b>	<b>Terjaganya hubungan baik dengan kepolisian, TNI, dan instansi vertikal</b>		<b>Rp 3.025.000</b>	

50	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Lareh Sago Halaban Kec. Lareh Sago Halaban				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Lareh Sago Halaban	terfasilitasi kegiatan organisasi ,lembaga dan tokoh keagamaan		Rp 1.650.000	
51	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Lareh Sago Halaban	Jumlah Laporan pelaksanaan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan		Rp 6.115.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Lareh Sago Halaban	Jumlah Laporan pelaksanaan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	12 laporan	Rp 3.300.000	
52	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan</b>	<b>Kec. Lareh Sago Halaban</b>	<b>Pembinaan terhadap masyarakat</b>	<b>8 Nagari</b>	<b>Rp 7.870.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Kec. Lareh Sago Halaban</b>			<b>Rp 31.650.000</b>	
53	<b>Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Kec. Lareh Sago Halaban</b>			<b>Rp 7.870.000</b>	<b>Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>				<b>Rp 31.650.000</b>	

54	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Lareh Sago Halaban	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan( Bimtek, sosialisasi, konsultasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	30 orang	Rp 5.320.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Lareh Sago Halaban	Pelaksanaan Rapat, Monitoring dan Sosialisasi serta Upacara Peringatan PHBN.	8 Nagari	Rp 2.825.000	
55	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Lareh Sago Halaban	Jumlah Dokumen Tugas Forum koordinasi pimpinan di kecamatan	12 dokumen	Rp 2.550.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Lareh Sago Halaban	Pelaksanaan Rapat dan Monitoring	8 Nagari	Rp 30.000.000	
56	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Kec. Lareh Sago Halaban</b>	<b>Persentase Nagari Yang berkinerja baik</b>	<b>8 Nagari</b>	<b>Rp 352.407.100</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Kec. Lareh Sago Halaban</b>	<b>Persentase Nagari Yang berkinerja baik</b>	<b>8 Nagari</b>	<b>Rp 26,265,000</b>	



57	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Kec. Lareh Sago Halaban Pemerintahan Desa	Kec. Lareh Sago Halaban	Produk hukum nagari	8 Nagari	Rp 352.407.100	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Kec. Lareh Sago Halaban Pemerintahan Desa	Kec. Lareh Sago Halaban				
58	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	Kec. Lareh Sago Halaban	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan Peraturan desa dan peraturan kepala desa	8 Nagari	Rp 4.835.00	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	Kec. Lareh Sago Halaban	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan Peraturan desa dan peraturan kepala desa	8 nagari	Rp 1,375,000	
59	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Koordinasi dengan pemerintahan nagari		Rp 4.150.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Lareh Sago Halaban	Rapat , Monitoring dan evaluasi	8 nagari	Rp 2,200,00	

60	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset	Kec. Lareh Sago Halaban	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	1 dokumen	Rp 3.220.000	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset	Kec. Lareh Sago Halaban	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	8 nagari	Rp 2,750,000	
61	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Lareh Sago Halaban	Terjaganya penyelenggaraan umum-patrol siaga	8 Nagari	Rp 17.365.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Lareh Sago Halaban	Supervisi dan pengawasan dana nagari	8 nagari	Rp 14.600.000	
62	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Lareh Sago Halaban	APB Nagari	8 Nagari	Rp 8.689.600	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Lareh Sago Halaban	APB dan laporan keuangan nagari	8 nagari	Rp 1,375,000	
63	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Lareh Sago Halaban	Koordinasi dengan pemerintahan nagari	8 Nagari	Rp 6.645.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Lareh Sago Halaban	Rapat , Monitoring dan evaluasi	8 nagari	Rp 3,965,000	
	<b>Total</b>				<b>Rp 3.493.069.512</b>	<b>Total</b>				<b>Rp 1,887,651,590</b>	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban tahun 2023 ini secara umum sudah menampung hasil usulan para pemangku kepentingan. Terkait dengan usulan dari pemangku kepentingan dalam hal ini masyarakat, Kecamatan Lareh Sago Halaban tidak memperoleh usulan secara langsung melalui Musrenbang baik mulai dari Musrenbang Nagari dan Kecamatan akan tetapi kebutuhan masyarakat terkait Pelayanan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat sudah diakomodir dalam Renja Kecamatan Lareh Sago Halaban Tahun 2023. Sehubungan dengan keadaan diatas, maka tabel usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 tidak ada penjelasannya.

**Tabel T-C.3.2**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Tahun 2023**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-	-	-	-	-	-

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan sasaran utama pembangunan nasional yang harus dicapai antara lain pencapaian target pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran dan penurunan angka kemiskinan. Adapun prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RKP Pusat Tahun 2023 meliputi :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industry dan penguatan reset terapan dalam rangka mendorong produktivitas
6. Ekonomi hijau
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban Tahun 2023**

Selain merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Lareh Sago Halaban maka Renja Kecamatan Lareh Sago Halabantahun 2023 juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023. Agar tercapai target Program dan kegiatan yang direncanakan maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Kerja Kecamatan Lareh Sago Halabantahun 2023 yang disesuaikan dengan tujuan yang ada di RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023, yaitu terdiri dari:

1. Tujuan
  - a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Layanan Publik di

- b. Kecamatan.
  - c. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari.
2. Sasaran
- a. Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan.
  - b. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik.
  - c. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari.
  - d. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Penetapan program dan kegiatan Kecamatan Lareh Sago Halabanuntuk Rencana Kerja tahun 2023 mengacu kepada program dan kegiatan yang mendukung visi dan misi Kepala daerah terutama visi ke 4 (empat) yaitu meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik dengan tujuannya adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas serta sasarannya adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Terkait dengan program ini maka program pada Kecamatan GunuangOmeh dikelompokkan ke dalam 6 program, yaitu program dan kegiatan pada setiap OPD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin, dan program kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah. Ringkasan Program dan Kegiatan Kecamatan Lareh Sago Halabanpada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

**Tabel 3.3**  
**Program dan kegiatan Kecamatan Lareh Sago Halaban**  
**( Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 )**

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD 5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

		4. Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor</li> <li>5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li> <li>6. Fasilitasi Kunjungan Tamu</li> <li>7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> </ul>
		8. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Mebel</li> </ul>
		9. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</li> </ul>
		10. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</li> <li>2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> <li>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</li> </ul>
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</li> <li>2. Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</li> </ul>

		2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3	Program Perbedayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Desa 2. Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1. Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan 2. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara republic Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan



6	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</li> <li>2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</li> <li>3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</li> <li>4. Fasilitasi Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban Umum</li> <li>5. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif</li> <li>6. Koordinasi Pedambing Desa di Wilayahnya</li> </ol>
---	---	--	---

Terkait dengan pendanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Lareh Sago Halaban dikelompokkan kedalam 6 program yaitu program dan kegiatan setiap OPD yang merupakan program dan kegiatan yang memiliki tujuan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan Nagari, Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan program kegiatan yang terkait dengan urusan Pemerintahan Daerah.

**Tabel 3.3**

**T.B. 36**

Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Prioritas Kecamatan Lareh Sago

Halaban

Kabupaten Lima Puluh Kota

( Analisa Data Capaian Kinerja Tahun 2021)

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interprestasi Belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	=	NIHIL	Sesuai nya perencanaan, penganggaran dengan realisasi Anggaran
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	=	NIHIL	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	=	NIHIL	
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	=	NIHIL	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	=	NIHIL	
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	=	NIHIL	

Dari program yang terdapat pada Kantor Camat Lareh Sago Halaban terdapat kesesuaian antara Program dan Indikator Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan tidak adanya hambatan yang berarti.

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023**  
**Dan Perkiraan Maju Tahun 2024**

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>													
<b>KECAMATAN</b>											<b>1,887,651,590</b>		<b>2,377,950,000</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>											<b>1,719,216,590</b>		<b>2,149,900,000</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>											<b>33,497,100</b>		<b>18,400,000</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah RENSTRA, RENJA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban.	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan	67 0	0 Dokumen 2 dokumen	67	4,410,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	67 0	3,400,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD RKA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban.	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan	67 0	0 Dokumen 2 Dokumen	67	4,400,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	67 0	2,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD d Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban.	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan	67 0	2 Dokumen 0 Dokumen	67	2,095,000		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	67 0	2,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban,	67 0	2 Dokumen 0 Dokumen	67	5,465,000	Dana Transfer Umum- Dana	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	67 0	2,000,000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Lareh Sago Halaban	SKPD	Lareh Sago Halaban.	Semua Kelurahan					Alokasi Umum		Lareh Sago Halaban		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban.	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan	67 0	2 Dokumen 0 Dokumen	67	3,735,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	67 0	2,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban.	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan	67 0	4 Dokumen 0 Laporan	67	13,392,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	67 0	7,000,000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								<b>1,315,806,690</b>					<b>1,809,000,000</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Pembayaran Gaji PNS, Tambahan Penghasilan PNS, Honorarium PA,KPA,PPK,PPTK,Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan	67 0	0 Orang/bulan 12 bulan	67	1,307,621,890	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	67 0	1,800,000,000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen SPJ	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan	67 0	0 Dokumen 12 Dokumen	67	750,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	67 0	1,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan	67 0	0 Laporan 4 Dokumen	67	4,309,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	67 0	4,000,000

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan	67 0	4 dokumen	67	1,325,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	67 0	3,000,000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	Laporan Prognosis	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan	67 0	1 Dokumen	67	1,800,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	67 0	1,000,000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								<b>2,280,000</b>					<b>1,000,000</b>
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	DUK, Karis, Karsu, Taspen, NPWP, Rekomendasi TPP dan SKP	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban.	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan	67 0	15 org	67	2,280,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	67 0	1,000,000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>166,786,900</b>					<b>132,750,000</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	komponen instalasi listrik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan	67 0	6 jenis	67	2,482,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	67 0	5,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	Laptop , Printer,Komputer , AC, Infokus	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan	67 0	7 Unit	67	45,100,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	67 0	20,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	Tersedianya alat Tulis Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan	67 0	20 jenis	67	14,037,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	67 0	13,000,000

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	penggandaan surat - surat dinas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67 0	12 bulan	67	11,885,900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	67 0	12,000,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	Tersedianya anggaran kunjungan Tamu	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan	67 0	12 bulan	67	2,875,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	67 0	2,750,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi , Makanan dan minuman	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan	67 0	12 bulan	67	90,407,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	67 0	80,000,000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>35,460,000</b>					<b>12,500,000</b>
Pengadaan Mebel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	Meja dan kursi Pimpinan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban.	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan	67 0	2 unit	67	35,460,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	67 0	12,500,000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>95,855,900</b>					<b>72,000,000</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	Tersedianya pembelian materi 10,000,-	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban.	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan	67 0	170 buah	67	3,170,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	67 0	4,500,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	pembayaran tagihan rekening listrik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban.	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan	67 0	12 bulan	67	4,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	67 0	2,500,000

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	Peralatan Kebersihan dan Honorarium petugas kebersihan dan honorarium pengelolaan brg	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban.	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan	67 0	12 bulan	67	88,685,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	67 0	65,000,000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>69,530,000</b>			<b>104,250,000</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	BBM, Suku Cadang, Service dan Pajak kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban.	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan	67 0	9 unit	67	65,340,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	67 0	85,750,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara perbaikan Printer, Komputer, Laptop, Infokus dan Televisi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban.	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan	67 0	0 Unit 4 unit	67	4,190,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	67 0	3,500,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban.	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan	67 0	1 Unit	67	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	67 0	15,000,000
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>								<b>59,500,000</b>			<b>83,050,000</b>	
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>								<b>3,940,000</b>			<b>7,450,000</b>	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	terlaksananya koordinasi dengan pemerintahan nagari	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan	94 0	1 kegiatan	94	1,740,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	94 0	2,950,000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemerintahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan	94 0	12 bulan	94	2,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	94 0	4,500,000
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>								<b>55,560,000</b>			<b>75,600,000</b>	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	Nilai Akuntabilitas	Pelaksanaan PATEN	Indeks Kepuasan	Kab. Lima Puluh	94 0	12 Tahun	94	55,560,000	Dana Transfer	Nilai Akuntabilitas	94 0	75,600,000

kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban		Masyarakat	Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan					Umum-Dana Alokasi Umum		Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban			
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>								<b>47,995,000</b>					<b>81,000,000</b>	
<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>								<b>22,995,000</b>						<b>36,000,000</b>
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Lareh Sago Halaban	musrenbang tk. kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan	8 nagari	200 org	94	12,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Lareh Sago Halaban	8 nagari	13,500,000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Lareh Sago Halaban	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan	8 nagari	12 bulan	94	10,875,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Lareh Sago Halaban	8 nagari	22,500,000	
<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>								<b>25,000,000</b>					<b>45,000,000</b>	
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan		100 Keluarga		12,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000	
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan		100 Keluarga		12,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000	
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>								<b>3,025,000</b>					<b>6,500,000</b>	
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>								<b>3,025,000</b>					<b>6,500,000</b>	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Terjaganya hubungan baik dengan kepolisian, TNI, dan instansi vertikal	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban,	94 0	1 kegiatan	1 Kegiatan	1,650,000	Dana Transfer Umum-Dana		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94 0	3,500,000	



dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				Semua Kelurahan					Alokasi Umum				
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	terfasilitasi kegiatan organisasi ,lembaga dan tokoh keagamaan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan	94 0	1 kegiatan	1 Kegiatan	1,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94 0	3,000,000
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>								<b>31,650,000</b>				<b>24,000,000</b>	
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>								<b>31,650,000</b>				<b>24,000,000</b>	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Pelaksanaan Rapat, Monitoring dan Sosialisasi serta Upacara Peringatan PHBN.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan	94 0	8 nagari	8 nagari	1,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94 0	17,500,000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Pelaksanaan Rapat dan Monitoring	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan	94 0	8 nagari	8 nagari	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94 0	6,500,000
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>								<b>26,265,000</b>				<b>33,500,000</b>	
<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>								<b>26,265,000</b>				<b>33,500,000</b>	
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Nagari yang menetapkan APB-nagari tepat waktu	Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari	Jumlah Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan	8 nagari	8 nagari	8 nagari	1,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Nagari yang menetapkan APB-nagari tepat waktu	8 nagari	3,500,000
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari yang menetapkan APB-nagari tepat waktu	Rapat , Monitoring dan evaluasi	Jumlah Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan	8 nagari	12 bulan	8 nagari	2,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Nagari yang menetapkan APB-nagari tepat waktu	8 nagari	4,500,000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Nagari yang menetapkan APB-nagari tepat waktu	Supervisi dan pengawasan dana nagari	Jumlah Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan	8 nagari	2 kegiatan	8 nagari	2,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Nagari yang menetapkan APB-nagari tepat waktu	8 nagari	2,500,000
Fasilitasi Penyelenggaraan	Jumlah	monitoring dan evaluasi	Jumlah Nagari	Kab. Lima	8 nagari	8 nagari	8 nagari	14,600,000	Dana		Jumlah	8 nagari	7,500,000

Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Nagari yang menetapkan APB-nagari tepat waktu		yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan					Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nagari yang menetapkan APB-nagari tepat waktu		
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Nagari yang menetapkan APB-nagari tepat waktu	APB dan laporan keuangan nagari	Jumlah Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan	8 nagari	8 nagari	8 nagari	1,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Nagari yang menetapkan APB-nagari tepat waktu	8 nagari	3,500,000
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Nagari yang menetapkan APB-nagari tepat waktu	Rapat , Monitoring dan evaluasi	Jumlah Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan	8 nagari	12 bulan	8 nagari	3,965,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Nagari yang menetapkan APB-nagari tepat waktu	8 nagari	12,000,000
								<b>1,887,651,590</b>					<b>2,377,950,000</b>

**Tabel 4.2****Rencana Target Kinerja IKU Kecamatan Lareh Sago Halaban**

No	Sasaran	Indikator	Target		Ket.
			2022	2023	
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai AKIP	67	68	IKU OPD
2	Meningkatnya Aktivitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	90	91	IKU OPD
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Unsur Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	94	95	IKU OPD

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan Rencana Target Kinerja sesuai sasaran dan indikator untuk tahun 2022 dan 2023 agar dapat memaksimalkan kinerja untuk mencapai target yang telah ditentukan.

Tabel 4.3

## Rencana Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2022 &amp; 2023

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indikator	Target		Ket
			2022	2023	
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>65</b>	<b>66</b>	
	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	65	66	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	65	66	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	65	66	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	65	66	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	65	66	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	65	66	
2	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>90</b>	<b>91</b>	

	<b>Pelayanan Publik</b>	<b>(IKM)</b>			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	91	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	91	
3	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan</b>	<b>65 %</b>	<b>66%</b>	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	65%	66%	
4	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>90</b>	<b>91</b>	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	91	
5	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan</b>	<b>65</b>	<b>66</b>	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	65	66	

**Tabel 4.4**  
**Rencana Kebutuhan Pendanaan berdasarkan Urusan,**  
**Jumlah Program dan Kegiatan tahun 2023**

No	Bidang Urusan	Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2023		Tahun 2024	Ket.
		Program			Kegiatan			
		Jumlah	Total Pagu (Rp.)	Pagu indikatif (Rp.)	Jumlah	Total Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu indikatif (Rp.)	
<b>I.</b>	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.							
1.1	Kecamatan	6	<b>1.887.651.590</b>	<b>2.377.950.000</b>	14	<b>1.887.651.590</b>	<b>2.377.950.000</b>	
Total		6	<b>1.887.651.590</b>	<b>2.377.950.000</b>	14	<b>1.887.651.590</b>	<b>2.377.950.000</b>	

Berdasarkan tabel diatas rencana kebutuhan pendanaan Kecamatan Lareh Sago Halaban sesuai program dan kegiatan untuk tahun 2024 terjadi penambahan dari tahun 2023 untuk menunjang pelaksanaan kegiatan agar meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan kecamatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Terkait dengan penyiapan dan penyediaan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat OPD, Kecamatan Lareh Sago Halaban telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Kecamatan Lareh Sago Halaban (Renstra Kecamatan Lareh Sago Halaban) Tahun 2021-2026 yang memuat visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Lareh Sago Halaban selama 5 tahun kedepan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari kedua dokumen perencanaan di atas maka seluruh OPD perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) masing masing. Sehubungan dengan ini maka Kecamatan Lareh Sago Halaban juga menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban (Renja Kecamatan Lareh Sago Halaban) tahun 2023. Renja Kecamatan Lareh Sago Halaban ini memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Kecamatan Lareh Sago Halaban. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Kecamatan Gunuang Omeh, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Kecamatan Lareh Sago Halaban dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut untuk satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2023, seluruh kebutuhan pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2023 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Pakan Rabaa, Agustus 2022

**CAMAT LAREH SAGO HALABAN**



**RUMELLIA, S.STP, M.Si**  
**NIP.19770503 199511 2 001**



**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.59.0000 KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.59.0000 KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
7																			
7																			
7																			
7																			
7	0	0	2.0	0															
7	1	1	1	1															
7	0	0	2.0	0															
7	1	1	1	2															
7	0	0	2.0	0															
7	1	1	1	3															
7	0	0	2.0	0															
7	1	1	1	4															
7	0	0	2.0	0															
7	1	1	1	5															
7	0	0	2.0	0															
7	1	1	1	6															
7	0	0	2.0																
7	1	1	02																

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.59.0000 KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.59.0000 KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Sebelum	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7011201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah Persentase penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta penyusunan Laporan OPD	Pembayaran Gaji PNS dan tambahan penghasilan pegawai Kantor Camat Lareh Sago Halaban	terlaksananya Laporan Keuangan dan Dokumen Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	12 Bulan	12 Bulan	1,467,573,990	1,467,573,990	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah Persentase penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta penyusunan Laporan OPD	100 % 100 %	1,984,790,290	
7011203	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah Persentase penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta penyusunan Laporan OPD	Jumlah Dokumen SPJ	terlaksananya Laporan Keuangan dan Dokumen Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	929,800	929,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah Persentase penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta penyusunan Laporan OPD	100 % 100 %	3,500,000	
7011205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah Persentase penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta penyusunan Laporan OPD	Tersedianya Pembuatan Laporan Keuangan	terlaksananya Laporan Keuangan dan Dokumen Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	1,661,200	1,661,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah Persentase penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta penyusunan Laporan OPD	100 % 100 %	4,000,000	
701105	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>											<b>11,000,000</b>	<b>11,000,000</b>		<b>1,000,000</b>			
701152	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pelaksanaan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur dan Baju Dinas ASN dan Non ASN	Tersedianya Pembelian Baju Dinas PDH dan Baju Hitam Putih	Terlaksananya Kegiatan kepegawaian dan Pakaian Dinas PDH	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan	100 %	100 %	25 stel	25 stel	17 Orang	17 Orang	11,000,000	11,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur dan Baju Dinas ASN dan Non ASN	100 %	0	
701106	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											<b>52,605,300</b>	<b>52,605,300</b>		<b>178,750,000</b>			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.59.0000 KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.59.0000 KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
70102001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum	Tersedianya komponen instalasi Listrik / penerangan bangunan Kantor	terlaksananya Kegiatan-kegiatan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,376,000	1,376,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum	12 Bulan	3,500,000	
70102004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum	Kebutuhan Alat Tulis Kantor dan Peralatan Kebersihan	terlaksananya Kegiatan-kegiatan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	10,022,800	10,022,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum	12 Bulan	15,000,000	
70102005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum	Pelaksanaan Penggandaan dan Surat-Surat Dinas	terlaksananya Kegiatan-kegiatan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	7,431,500	7,431,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum	12 Bulan	13,500,000	
70102009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum	Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam / keluar Daerah	terlaksananya Kegiatan-kegiatan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	33,775,000	33,775,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum	12 Bulan	129,750,000	
70102008	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>102,783,500</b>	<b>102,783,500</b>			<b>175,880,000</b>		
70102008	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Tersedianya Materai Rp. 3.000,- dan Materai Rp. 6.000,-	Terlaksananya Pembayaran Honor Pegawai Non ASN Kantor dan Penunjang Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	2,050,000	2,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	14,600,000	
70102008	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Pelaksanaan Pembayaran tagihan Rekening Telepon, air, Listrik dan surat Kabar kantor	Terlaksananya Pembayaran Honor Pegawai Non ASN Kantor dan Penunjang Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	11,400,000	11,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	0	
70102004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Honor petugas kebersihan Kantor sebanyak 1 Orang, 3 Orang PHL, dan 1 Orang PTT, dan Jumlah paket penyediaan peralatan kebersihan Kantor	Terlaksananya Pembayaran Honor Pegawai Non ASN Kantor dan Penunjang Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	89,333,500	89,333,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	161,280,000	
70102009	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>66,360,000</b>	<b>66,360,000</b>			<b>93,750,000</b>		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.59.0000 KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.59.0000 KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
70102001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pelaksanaan Administrasi umum	Pelaksanaan pembayaran Pajak dan pemeliharaan Rutin / berkala perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas	Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Dan Peralatan Kantor Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	9 Unit	9 Unit	64,900,000	64,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan Administrasi umum	100 %	85,750,000			
70102006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelaksanaan Administrasi umum	pelaksanaan perbaikan AC, Ginset dan Komputer	Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Dan Peralatan Kantor Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	9 Unit	9 Unit	1,460,000	1,460,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan Administrasi umum	100 %	8,000,000			
70102	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>											<b>55,925,000</b>	<b>55,925,000</b>			<b>90,600,000</b>				
7010201	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>											<b>1,375,000</b>	<b>1,375,000</b>			<b>15,000,000</b>				
7010202	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan, konflik sosial dan koordinasi Forkompinca	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan		72 %	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,375,000	1,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan, konflik sosial dan koordinasi Forkompinca	72 %	15,000,000			
7010202	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>											<b>54,550,000</b>	<b>54,550,000</b>			<b>75,600,000</b>				
7010203	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Pelaksanaan PATEN dan 1 Orang PHL	Meningkatnya kepuasan Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	54,550,000	54,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	12 bulan	75,600,000			
70103	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>											<b>58,750,000</b>	<b>58,750,000</b>			<b>35,000,000</b>				
7010301	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>											<b>58,750,000</b>	<b>58,750,000</b>			<b>35,000,000</b>				
7010301	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase peningkatan fasilitasi musrenbang Nagari dan Kecamatan serta Dana Desa	Pelaksanaan Musrembang Tingkat Kecamatan	Tercapainya Masyarakat yang Terampil	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan		72 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	6,370,000	6,370,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan fasilitasi musrenbang Nagari dan Kecamatan serta Dana Desa	72 %	12,500,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.59.0000 KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.59.0000 KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
70320031	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase peningkatan fasilitasi musrenbang Nagari dan Kecamatan serta Dana Desa	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Hari- Hari Besar Lainnya dan PKK	Tercapainya Masyarakat yang Terampil	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan		72 %	4 Kegiatan	4 Kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	52,380,000	52,380,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan fasilitasi musrenbang Nagari dan Kecamatan serta Dana Desa	72 %	22,500,000	
705	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>												<b>1,375,000</b>	<b>1,375,000</b>		<b>16,000,000</b>		
705201	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>												<b>1,375,000</b>	<b>1,375,000</b>		<b>16,000,000</b>		
70518	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan, konflik sosial dan koordinasi Forkompinca	Pelaksanaan Monitoring Pelaksanaan Rapat	Terlaksannya koordinasi dan konsultasi dengan perangkat Nagari	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan		72 %	10 Kali 1 kegiatan	10 Kali 1 kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	1,375,000	1,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan, konflik sosial dan koordinasi Forkompinca	72 %	9,000,000	
706	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>												<b>3,500,000</b>	<b>3,500,000</b>		<b>17,000,000</b>		
706201	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>												<b>3,500,000</b>	<b>3,500,000</b>		<b>17,000,000</b>		
70611	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan Pemerintahan Nagari	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	Terlaksananya Supervisi dan pengawasan Dana Nagari Tepat Waktu	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan		72 %	100 %	100 %	8 Nagari	8 Nagari	1,300,000	1,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan Pemerintahan Nagari	72 %	0	
70617	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase peningkatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan Pemerintahan Nagari	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rapat	Terlaksananya Supervisi dan pengawasan Dana Nagari Tepat Waktu	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan		72 %	20 Kali 1 Kegiatan	20 Kali 1 Kegiatan	8 Nagari	8 Nagari	2,200,000	2,200,000		Persentase peningkatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan Pemerintahan Nagari	72 %	5,000,000	
<b>TOTAL</b>													<b>1,832,651,590</b>	<b>1,832,651,590</b>		<b>2,660,770,290</b>		



# BUPATI LIMA PULUH KOTA

---

## KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 391 TAHUN 2021

### TENTANG

### PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO*

#### BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 125 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, perlu dibentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 71) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 25).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Membentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Di Lingkungan Pemerintah



Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan *Ex-Officio* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tugas secara umum :
    - a. Mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023;
    - b. Melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah seperti Forum Perangkat Daerah, dan rapat-rapat lainnya.
    - c. Menyusun dan menyajikan Rencana Kerja (Renja), mulai dari Rancangan Awal sampai pada penetapan Renja, sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :
    - a. Ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
    - b. Wakil Ketua I bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
    - c. Wakil Ketua II bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
    - d. Wakil Ketua III bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
    - e. Sekretaris bertugas mengecek dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
    - f. Anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, dan menulis serta mengetik naskah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua Tim dapat menetapkan

pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota Tim.

**KELIMA**

: Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 dan 2022 melalui DPA masing-masing Perangkat Daerah.

**KEENAM**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 6 Desember 2021

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**



**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**

NOMOR : 391 TAHUN 2021

TANGGAL : 06 Desember 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM  
PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO*

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>1.</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	
	Sekretaris Daerah	Ketua
	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I
	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan	Wakil Ketua II
	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua III
	Kabag Perencanaan Dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Pemerintahan	Anggota
	Kabag Hukum	Anggota
	Kabag Organisasi	Anggota
	Kabag Administrasi Pembangunan	Anggota
	Kabag Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kabag Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Anggota
	Kabag Kesejahteraan Rakyat	Anggota
	Kabag Umum	Anggota
	Kabag Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
	Kasubag Perencanaan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Pelaporan	Anggota
	Kasubag Protokol	Anggota
	Kasubag Komunikasi Pimpinan	Anggota
	Kasubag Dokumentasi Pimpinan	Anggota
	Kasubag Kelembagaan Dan Anjab	Anggota
	Kasubag Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	Anggota
	Kasubag Kinerja Dan Reformasi Birokrasi	Anggota
	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perlengkapan	Anggota
	Kasubag Rumah Tangga	Anggota
	Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Anggota
	Kasubag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Anggota
	Kasubag Pimpinan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	Anggota
	Kasubag Penyusunan Program	Anggota
	Kasubag Pengendalian Program	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasubag Evaluasi Dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Pembinaan BUMD Dan BLUD	Anggota
	Kasubag Perekonomian	Anggota
	Kasubag Sumber Daya Alam	Anggota
	Kasubag Peraturan Perundang-Undangan	Anggota
	Kasubag Bantuan Hukum	Anggota
	Kasubag Dokumentasi Dan Informasi	Anggota
	Kasubag Bina Mental Dan Spiritual	Anggota
	Kasubag Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasubag Kesejahteraan Masyarakat	Anggota
	Kasubag Administrasi Pemerintahan Dan Kewilayahan	Anggota
	Kasubag Otonomi Daerah	Anggota
	Kasubag Kerjasama Daerah	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Daerah	Anggota
<b>2.</b>	<b>SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>	
	Sekretaris DPRD	Ketua
	Kabag Umum dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Anggota
	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Anggota
	Kasubag Fasilitasi Penganggaran	Anggota
	Kasubag Program dan Keuangan	Anggota
	Kasubag Kajian Perundang-Undangan	Anggota
	Kasubag Humas, Protokol, dan Publikasi	Anggota
	Kasubag Fasilitasi Pengawasan	Anggota
	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Rumah Tangga	Anggota
	Kasubag Persidangan dan Risalah	Anggota
	Kasubag Kerjasama dan Aspirasi	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
<b>3.</b>	<b>INSPEKTORAT</b>	
	Inspektur	Ketua
	Sekretariat	Sekretaris
	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Anggota
	Inspektur Pembantu Pengawasan Tertentu	Anggota
	Kasubag Perencanaan	Anggota
	Kasubag Analisi Dan Evaluasi	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasubag Administrasi Umum Dan Keuanagn	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat	Anggota
	Pelaksana pada Inspektorat	Anggota
<b>4.</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>	
	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
	Sekretaris Dinas Kesehatan	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Kesehatan	Anggota
	Kabid Sumber Daya Kesehatan	Anggota
	Kabid Kesehatan Masyarakat	Anggota
	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Evaluasi, Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan dan Pengelolaan Aset	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Alat Kesehatan dan Fasyankes	Anggota
	Kasi Pelayanan Kefarmasian dan Perizinan	Anggota
	Kasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Anggota
	Kasi Surveilens, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis Kesehatan	Anggota
	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Anggota
	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Nafza	Anggota
	Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Anggota
	Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Anggota
	Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Pelayanan Kesehatan Primer	Anggota
	Kasi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pelayanan Kesehatan Haji, dan Jaminan Kesehatan	Anggota
	Kasi Peningkatan Mutu dan Akreditasi, dan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kesehatan	Anggota
<b>5.</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	
	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
	Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar	Anggota
	Kabid Pembinaan PAUD dan PNF	Anggota
	Kabid Pembinaan Ketenagaan	Anggota
	Kabid Kebudayaan	Anggota
	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan dan BMD	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Kurikulum dan Penilaian	Anggota
	Kasi Peserta Didik dan Pendidikan Karakter	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasana	Anggota
	Kasi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana	Anggota
	Kasi Pendidikan Non Formal	Anggota
	Kasi PTK PAUD dan PNF	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SD	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMP	Anggota
	Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota
	Kasi Sejarah dan Nilai Tradisi	Anggota
	Kasi Kesenian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
<b>6.</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
	Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
	Kepala Bidang Cipta Karya	Anggota
	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
	Kepala Bidang Jasa Konstruksi	Anggota
	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Pelaksanaan Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Bina Marga	Anggota
	Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Anggota
	Kasi Preservasi Jalan dan Jembatan	Anggota
	Kasi Perencanaan Jasa Konstruksi	Anggota
	Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan	Anggota
	Kasi Pemantauan Dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Tata Ruang	Anggota
	Kasi Pemanfaatan dan pengendalian	Anggota
	Kasi Pertanahan	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Cipta Karya	Anggota
	Kasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Anggota
	Kasi Tata Bangunan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	2	3
<b>7.</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	
	Kepala Satpol PP	Ketua
	Sekretaris Satpol PP	Sekretaris
	Kabid Trantib	Anggota
	Kabid Perlindungan Masyarakat	Anggota
	Kabid PPUUD	Anggota
	Kabid SDA	Anggota
	Kasubag Program & Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Intelijen	Anggota
	Kasi Trantib & Pengamanan	Anggota
	Kasi Operasional & Logistik	Anggota
	Kasi Bina Potensi	Anggota
	Kasi Data Informasi	Anggota
	Kasi Satlinmas dan Pengaduan Masyarakat	Anggota
	Kasi Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kasi Penegakan	Anggota
	Kasi Pembinaan Pengawasan & Penyuluhan	Anggota
	Kasi Pelatihan Dasar	Anggota
	Kasi Teknis Fungsional	Anggota
	Kasi Tindak Internal	Anggota
	Pelaksana pada Satpol PP	Anggota
<b>8.</b>	<b>DINAS PEMADAM KEBAKARAN</b>	
	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran	Ketua
	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran	Sekretaris
	Kabid Pencegahan	Anggota
	Kabid Pemadam Dan Penyelamatan	Anggota
	Kabid Sarana Dan Prasarana	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan Dan Keuangan	Anggota
	Kasi Pencegahan Dan Inspeksi	Anggota
	Kasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Dunia Usaha	Anggota
	Kasi Pengendalian Operasi Dan Komunikasi	Anggota
	Kasi Pemadam Dan Investigasi	Anggota
	Kasi Penyelamatan Dan Evakuasi	Anggota
	Kasi Pengadaan Sarana Dan Prasarana	Anggota
	Kasi Pemeliharaan Dan Perawatan Sarana	Anggota
	Kasi Informasi Dan Pengelolaan Data	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pemadam Kebakaran	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	2	3
<b>9.</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	
	Kepala Dinas Sosial	Ketua
	Sekretaris Dinas Sosial	Sekretaris
	Kabid Rehabilitasi Sosial	Anggota
	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Korban Nafza dan Korban Perdagangan Orang	Anggota
	Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana	Anggota
	Kasi Perlindungan Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar	Anggota
	Kasi Jaminan Sosial Keluarga	Anggota
	Kasi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan Stimulan	Anggota
	Kasi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Sosial	Anggota
<b>10.</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	
	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
	Kasubag Perencanaan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Identitas Penduduk	Anggota
	Kasi Pindah Datang Penduduk	Anggota
	Kasi Pendataan Penduduk	Anggota
	Kasi Kelahiran	Anggota
	Kasi Perkawinan dan Perceraian	Anggota
	Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Penyajian Data	Anggota
	Kasi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
	Kasi Kerjasama	Anggota
	Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Anggota



<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Inovasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
<b>11.</b>	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	
	Kepala DPPKBPPPA	Ketua
	Sekretaris DPPKBPPPA	Sekretaris
	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Anggota
	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk	Anggota
	Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kepala Seksi Penyuluhan, Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Anggota
	Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokasi	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi	Anggota
	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan	Anggota
	Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi Anak	Anggota
	Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak	Anggota
	Pelaksana pada DPPKBPPPA	Anggota
<b>12.</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	
	Kepala DPMPTSP	Ketua
	Sekretaris DPMPTSP	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Terpadu	Anggota
	Kabid Promosi	Anggota
	Kabid Perencanaan dan Pengembangan	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pelayanan Perizinan Umum	Anggota
	Kasi Pelayanan Perizinan Umum Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Lainnya	Anggota
	Kasi Promosi	Anggota
	Kasi Sarana dan Prasarana Promosi	Anggota
	Kasi Data dan Informasi	Anggota
	Kasi Perencanaan Potensi dan Peluang Investasi	Anggota
	Kasi Penyuluhan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Regulasi Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pemantauan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pembinaan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pengawasan Penanaman Modal	Anggota
	Pelaksana pada DPMPTSP	Anggota
<b>13.</b>	<b>DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH</b>	
	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Ketua
	Sekretaris Perdagangan, Koperasi UKM	Sekretaris
	Kepala Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kelembagaan & Pengawasan Koperasi	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi & Usaha Mikro	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan perizinan	Anggota
	Kasi Peningkatan kualitas SDM koperasi & kewirausahaan	Anggota
	Kasi Metrologi	Anggota
	Kasi Pengembangan Jaringan Perdagangan	Anggota
	Kasi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan	Anggota
	Kasi Sarana Distribusi dan Stabilitas Barang Pokok dan Penting	Anggota
	Kasi Pengawasan Perizinan dan Pendaftaran	Anggota
	Kasi Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Anggota
	Kasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan	Anggota
	Kasi Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kesehatan Koperasi	
	Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	Anggota
	Kasi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Anggota
<b>14.</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA</b>	
	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Ketua
	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sekretaris
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Industri	Anggota
	Kabid Sarana dan Prasarana Industri	Anggota
	Kabid Ketenagakerjaan	Anggota
	Kabid Transmigrasi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pembinaan Industri Agro	Anggota
	Kasi Pembinaan Industri Non Agro	Anggota
	Kasi Pengawasan, Sertifikasi dan Standarisasi Industri	Anggota
	Kasi Perizinan dan Data	Anggota
	Kasi Pengembangan teknologi Industri	Anggota
	Kasi Promosi dan Pemasaran	Anggota
	Kasi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja	Anggota
	Kasi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
	Kasi Perlindungan Tenaga Kerja	Anggota
	Kasi Penempatan Transmigrasi	Anggota
	Kasi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Anggota
	Kasi Informasi dan Pembinaan SDM Transmigrasi	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
<b>15.</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	
	Kepala Diskominfo	Ketua
	Sekretaris Diskominfo	Sekretaris
	Kabid Komunikasi Publik	Anggota
	Kabid Aplikasi Informatika	Anggota
	Kabid Statistik dan Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Kabid Persandian Dan Manajemen Data Elektronik	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik	Anggota
	Kasi Pengelola Media Komunikasi Publik	Anggota
	Kasi Layanan Hubungan Media Dan Kehumasan	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Anggota
	Kasi Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Anggota
	Kasi Aplikasi	Anggota
	Kasi Statistik Sektor Ekonomi Dan Infastruktur	Anggota
	Kasi Statistik Sektor Pemerintahan Dan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Kasi Identifikasi Deteksi Dan Proteksi Keamanan SIBER	Anggota
	Kasi Penanggulangan Pemulihan Pemantauan Dan Pengendalian	Anggota
	Kasi Manajemen Data Elektronik	Anggota
	Pelaksana pada Diskominfo	Anggota
<b>16.</b>	<b>DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>	
	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Ketua
	Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kabid Pariwisata	Anggota
	Kasi Promosi dan Informasi	Anggota
	Kasi Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata	Anggota
	Kasi Kemitraan dan Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kabid Pemuda	Anggota
	Kasi Peningkatan Kreatifitas Kewirausahaan Pemuda	Anggota
	Kasi Pengembangan Kompetensi Pemuda	Anggota
	Kasi Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Anggota
	Kabid Olahraga	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Pendidikan	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Prestasi	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Rekreasi dan Tradisi	Anggota
	Kabid Sarana Prasarana dan Pengembangan SDM	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana Pariwisata	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana Pemuda Olah Raga	Anggota
	Kasi Pendataan dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Anggota
<b>17.</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI</b>	
	Kepala DPMD/N	Ketua
	Sekretaris DPMD/N	Sekretaris
	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kabid Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Ketahanan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Adat, Sosial Budaya dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kawasan Nagari, SDA dan TTG	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Aparatur dan Lembaga Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kasi Administrasi Produk Hukum Nagari dan Kerjasama antar Nagari	Anggota
	Kasi Organisasi Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kasi Perencanaan Keuangan Nagari	Anggota
	Kasi Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Nagari	Anggota
	Kasi Aset dan Kekayaan Nagari	Anggota
	Pelaksana pada DPMD/N	Anggota
<b>18.</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	
	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perhubungan	Sekretaris
	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Anggota
	Kepala Bidang Prasarana	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Lalu Lintas	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana	Anggota
	Kasi Pengujian Sarana	Anggota
	Kasi Angkutan	Anggota
	Kasi Pengoperasian Prasarana	Anggota
	Kasi Perawatan Prasarana	Anggota
	Kasi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	Anggota
	Kasi Lingkungan Perhubungan	Anggota
	Kasi Keselamatan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
<b>19.</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN</b>	
	Kepala DLHPP	Ketua
	Sekretaris DLHPP	Sekretaris
	Kabid Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kapasitas Lingkungan Hidup	
	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Operasional Penanganan Sampah	Anggota
	Kasi Pengelolaan Limbah dan Sampah	Anggota
	Kasi Pertamanan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Anggota
	Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Anggota
	Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Perumahan	Anggota
	Kasi Kawasan Permukiman	Anggota
	Kasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Anggota
	Analisis Lingkungan Hidup	Anggota
	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan	Anggota
	Pelaksana pada DLHPP	Anggota
<b>20.</b>	<b>DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN</b>	
	Kepala Distanhorbun	Ketua
	Sekretaris Distanhorbun	Sekretaris
	Kabid Sarana	Anggota
	Kabid Prasarana	Anggota
	Kabid Perlindungan Tanaman Dan Perizinan Usaha	Anggota
	Kabid penyuluhan	Anggota
	Kasubag Perencanaan Dan Evaluasi	Anggota
	Kasubag Keuangan Dan Aset	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Pupuk Dan Pestisida	Anggota
	Kasi Sumber Daya Genetik	Anggota
	Kasi Alat Dan Mesin Pertanian	Anggota
	Kasi Pengembangan Prasarana	Anggota
	Kasi Irigasi	Anggota
	Kasi Infrastruktur Pertanian	Anggota
	Kasi Perlindungan Tanaman	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Penanganan Dampak Perubahan Iklim Dan Bencana Alam	Anggota
	Kasi Perizinan Dan Pembinaan Usaha	Anggota
	Kasi Kelembagaan	Anggota
	Kasi Ketenagaan	Anggota
	Kasi Penyelenggaraan Penyuluhan	Anggota
	Pelaksana pada Distanhorbun	Anggota
<b>21.</b>	<b>DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>	
	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua
	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sekretaris
	Kabid Perbibitan dan Produksi	Anggota
	Kabid Keswan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kabid. Sarana dan Prasarana	Anggota
	Kabid Penyuluhan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Kasi Non Ruminansia	Anggota
	Kasi Kasi Ruminansia	Anggota
	Kasi Perbibitan	Anggota
	Kasi Kesmavet	Anggota
	Kasi Kesehatan Hewan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kasi Pakan	Anggota
	Kasi Pembiayaan dan Investasi	Anggota
	Kasi Lahan dan Irigasi	Anggota
	Kasi Kelembagaan	Anggota
	Kasi Metode dan Infomasi	Anggota
	Kasi Ketenagaan	Anggota
	Pelaksana pada Disnakkeswan	Anggota
<b>22.</b>	<b>DINAS PERIKANAN</b>	
	Kepala Dinas Perikanan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perikanan	Sekretaris
	Kabid Pengembangan Sumberdaya Perikanan	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Usaha Perikanan	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Pengelolaan Kawasan Budidaya, Tata Pemanfaatan Air, Lahan dan Pelestarian Plasma Nutiah	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Anggota
	Kasi Pengendalian Mutu Pembudiyaaan Ikan	Anggota
	Kasi Sarana dan Prasarana Perikanan	Anggota
	Kasi Jaminan Perlindungan Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Penguatan Daya Saing Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Kemitraan Usaha dan Fasilitasi Perizinan Perikanan	Anggota
	Kasi Kelembagaan, Pendampingan dan Koordinasi Penyuluhan Perikanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perikanan	Anggota
<b>23.</b>	<b>DINAS PANGAN</b>	
	Kepala Dinas Pangan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pangan	Sekretaris
	Kabid Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
	Kabid Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Ketersediaan Pangan	Anggota
	Kasi Distribusi dan Harga Pangan	Anggota
	Kasi Kerawanan Pangan	Anggota
	Kasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Anggota
	Kasi Pengembangan Pangan Lokal	Anggota
	Kasi Keamanan Pangan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pangan	Anggota
<b>24.</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>	
	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris
	Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Deposit dan Pelestarian Bahan Pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Promosi dan Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pengembangan, Pengolahan Bahan Pustaka dan TIK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota



<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Arsip Dinamis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Arsip Statis dan Layanan Informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pembinaan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pengawasan Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Fungsional Pustakawan	Anggota
	Fungsional Kearsipan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pustaka dan Kearsipan	Anggota
<b>25.</b>	<b>BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	
	Kepala Bapelitbang	Ketua
	Sekretaris Bapelitbang	Sekretaris
	Kabid Ekonomi Penelitian dan Pengembangan	Anggota
	Kabid SDM, Sosbud dan Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Kabid Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi Bapelitbang	Anggota
	Kabid Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Program Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Keuangan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pertanian dan Perikanan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Perindustrian, Perdagangan, UMK, Penanaman Modal dan Pariwisata Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Sosial Budaya Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Sumber Daya Manusia Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Infrastruktur Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pengembangan Wilayah Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Data dan Informasi Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang	Anggota
	Pelaksana pada Bapelitbang	Anggota
<b>26.</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM</b>	
	Kepala BKPSDM	Ketua

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Sekretaris BKPSDM	Sekretaris
	Kabid Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial ASN	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kabid Pengembangan dan Disiplin ASN	Anggota
	Kasubid Kepangkatan	Anggota
	Kasubid Mutasi	Anggota
	Kasubid Displin ASN	Anggota
	Kabid Informasi Pengadaan dan Status PNS	Anggota
	Kasubid Status ASN	Anggota
	Kasubid Informasi ASN	Anggota
	Kasubid Formasi dan Pengadaan ASN	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada BKPSDM	Anggota
<b>27.</b>	<b>BADAN KEUANGAN</b>	
	Kepala Badan Keuangan	Ketua
	Sekretaris Badan Keuangan	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kabid Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kabid Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kabid Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	2	3
	Evaluasi Pendapatan Daerah	
	Kasubid 1 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Pelaksana pada Badan Keuangan	Anggota
<b>28.</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	
	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Ketua
	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sekretaris
	Kabid Ideologi Dan Wasbang	Anggota
	Kabid Politik Dalam Negeri	Anggota
	Kabid Kewaspadaan Dan Pembinaan Masyarakat	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubid Bina Ideologi	Anggota
	Kasubid Bina Wasbang	Anggota
	Kasubid Bintah, Eksosbud Dan Agama	Anggota
	Kasubid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini	Anggota
	Kasubid HAL Dan Fasilitasi Pemilu	Anggota
	Kasubid Fasilitasi Parpol Dan Ormas	Anggota
	Pelaksana pada Badan Kesbangpol	Anggota
<b>29.</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	
	Kepala Pelaksana BPBD	Ketua
	Sekretaris BPBD	Sekretaris
	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota
	Kabid Kedaruratan dan Logistik	Anggota
	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pencegahan	Anggota
	Kasi Kesiapsiagaan	Anggota
	Kasi Kedaruratan	Anggota
	Kasi Logistik	Anggota
	Kasi Rehabilitasi	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Rekonstruksi	Anggota
	Pelaksana pada BPBD	Anggota
<b>30.</b>	<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS</b>	
	Direktur RSUD dr. Achmad Darwis	Ketua
	Kabag Tata Usaha	Sekretaris
	Kabid Perencanaan Pelaporan Sarana Prasarana dan Logistik	Anggota
	Kabid Pelayanan Penunjang dan Promosi Kesehatan	Anggota
	Kabid Pelayanan Medis dan Keperawatan	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana Dan Logistik	Anggota
	Kasi Perencanaan Dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Pelayanan Penunjang Medis	Anggota
	Kasi Pelayanan Penunjang Non Medis Dan Promosi Kesehatan	Anggota
	Kasi Pelayanan Medis	Anggota
	Kasi Pelayanan Perawatan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Humas	Anggota
	Kasubag Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada RSUD Achmad Darwis	Anggota
<b>31.</b>	<b>KECAMATAN GUGUAK</b>	
	Camat Guguak	Ketua
	Sekretaris Camat Guguak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Guguak	Anggota
<b>32.</b>	<b>KECAMATAN PAYAKUMBUH</b>	
	Camat Payakumbuh	Ketua
	Sekretaris Camat Payakumbuh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Payakumbuh	Anggota
<b>33.</b>	<b>KECAMATAN MUNGKA</b>	
	Camat Mungka	Ketua
	Sekretaris Camat Mungka	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Mungka	Anggota
<b>34.</b>	<b>KECAMATAN SULIKI</b>	
	Camat Suliki	Ketua
	Sekretaris Camat Suliki	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Suliki	Anggota
<b>35.</b>	<b>KECAMATAN BUKIK BARISAN</b>	
	Camat Bukik Barisan	Ketua
	Sekretaris Camat Bukik Barisan	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Bukik Barisan	Anggota
<b>36.</b>	<b>KECAMATAN GUNUANG OMEH</b>	
	Camat Gunuang Omeh	Ketua
	Sekretaris Camat Gunuang Omeh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Gunuang Omeh	Anggota
<b>37.</b>	<b>KECAMATAN LUAK</b>	
	Camat Luak	Ketua
	Sekretaris Camat Luak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Luak	Anggota
<b>38.</b>	<b>KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN</b>	
	Camat Lareh Sago Halaban	Ketua
	Sekretaris Camat Lareh Sago Halaban	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Lareh Sago Halaban	Anggota
<b>39.</b>	<b>KECAMATAN HARAU</b>	
	Camat Harau	Ketua
	Sekretaris Camat Harau	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Harau	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>40.</b>	<b>KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI</b>	
	Camat Situjuah Limo Nagari	Ketua
	Sekretaris Camat Situjuah Limo Nagari	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Situjuah Limo Nagari	Anggota
<b>41.</b>	<b>KECAMATAN AKABILURU</b>	
	Camat Akabiluru	Ketua
	Sekretaris Camat Akabiluru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Akabiluru	Anggota
<b>42.</b>	<b>KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU</b>	
	Camat Pangkalan Koto Baru	Ketua
	Sekretaris Camat Pangkalan Koto Baru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Anggota
<b>43.</b>	<b>KECAMATAN KAPUR IX</b>	
	Camat Kapur IX	Ketua
	Sekretaris Camat Kapur IX	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Kapur IX	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 6 Desember 2021

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**



**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**